

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. LN. 85, TLN. 4740

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LN. 125

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 140, TLN. 3874

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame. LN. 31

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame. LN. 61

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. LN. 75

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. LN. 74, TLN. 5135

Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kawasan Kendali Ketat Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

C. Media Internet

<http://repository.ui.ac.id/ contents/>

[koleksi/11/f6471a00acc8a004ba9713e961075487a62cbe23.pdf](http://repository.ui.ac.id/ koleksi/11/f6471a00acc8a004ba9713e961075487a62cbe23.pdf)

<http://edipranoto.blogspot.com/2011/05/sanksi-hukum-administrasi.html>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=learning&page=show&id=106&q=&hlm=>

<http://cangkang.vivanews.com/ramadan/news/read/174462-265-papan-reklame-di-jakarta-ilegal>

D. Data Survey

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Parasian Purba S.E,M.M, Kasie Pendaftaran dan Pendataan, Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Somahardja, Staff Pendaftaran dan Perijinan, Kantor Konsultan Pajak VivaTax